
Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dhona Pratiwi^a, Hariyati^b

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan jumlah sampel sebanyak 39 perusahaan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Pengukuran koneksi politik menggunakan variabel *dummy*, *corporate governance* menggunakan mekanisme *corporate governance*, dan kinerja keuangan perusahaan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata kunci: *Corporate Governance*; Kinerja Keuangan; Koneksi Politik;

The Influence of Political Connections and Corporate Governance on The Company's Financial Performance

ABSTRACT

This research has purpose to determine the effect of political connections and corporate governance on financial performance. The population used are the mining sector companies which listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018 with a total sample of 39 companies based on purposive sampling technique. Political connections are measured using dummy variables, corporate governance used corporate governance mechanisms, and financial performance used Return on Assets (ROA). Data analysis techniques used multiple linear regression analysis helped by SPSS. The results show that political connections, audit committees, institutional ownership, and managerial ownership have no effect on the financial performance. Meanwhile, the independent board of commissioners has a negative effect on financial performance.

Keywords: *Financial Performance; Political Connections; Corporate Governance*

PENDAHULUAN

Era persaingan industri yang sangat ketat, seringkali memaksa perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Baik buruknya kinerja yang dihasilkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pencapaian keberhasilan kinerja sebuah perusahaan, antara lain yaitu faktor lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Raharja, 2013), salah satunya adalah politik. Politik dan bisnis merupakan hal yang saling berkaitan. Aktivitas politik yang berjalan di sebuah negara menghasilkan kebijakan dimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi proses bisnis. Di sisi lain, untuk menjalankan proses politik juga dibutuhkan dukungan, baik dukungan secara materi maupun logistik utamanya dunia bisnis dalam bentuk pendanaan.

Adanya etika balas budi yang kental di Indonesia menyebabkan dukungan perusahaan pada dunia politik tidak diberikan secara gratis (Raharja, 2013). Perusahaan mengharapkan adanya timbal balik dari dukungan yang telah diberikan untuk mendukung usaha yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Keterkaitan antara politik dan bisnis ini memunculkan istilah koneksi politik. Fenomena koneksi politik telah berkembang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Gelaran pemilihan presiden maupun kepala daerah di Indonesia melibatkan berbagai dukungan dari dunia bisnis. Dikutip dari laman Suara.com, Pilpres 2019 kental dengan kepentingan para pebisnis tambang dimana perusahaan memberikan sejumlah dana dan sebagai timbal baliknya perusahaan akan meminta kemudahan perizinan

usaha jika pasangan calon telah menjabat. Pada tahun 2010, jumlah IUP mengalami kenaikan signifikan menjadi 11 ribu dimana sebelumnya hanya sejumlah 750 izin di tahun 2001 (Ratnasari, 2016).

Koneksi politik yang terbangun antara perusahaan dengan pemerintah atau politisi dianggap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya potongan pajak, subsidi dari pemerintah, kekuatan pasar, dan lain – lain. Perusahaan dapat dengan mudah menerima tender dari pemerintah dan mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2016). Manfaat – manfaat yang diperoleh ini akan membuat perusahaan menjadi fokus untuk memperoleh *profit*. Penelitian Wu et al., (2012) menyebutkan bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Tetapi, menurut Dicko (2016), pengaruh antara kedua variabel tersebut adalah negatif. Tidak selaras dengan penelitian Prihandono (2018), yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara koneksi politik dan keuangan perusahaan.

Selain koneksi politik, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan, yaitu *Corporate Governance*. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan maksimal adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. Penerapan tata kelola yang baik dalam kinerja perusahaan juga merupakan salah satu kunci bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang, serta agar dapat bersaing secara global.

Setelah adanya krisis yang berkesinambungan sejak tahun 1998, perbincangan mengenai isu tentang *good corporate governance* mulai menjadi topik bahasan penting, khususnya di Indonesia. Salah satu faktor yang dianggap berperan penting atas krisis yang terjadi di berbagai negara dan kebangkrutan yang menimpa sejumlah perusahaan adalah lemahnya *corporate governance*. Kondisi ini diperparah dengan adanya faktor politik dimana hal ini dapat menyebabkan perusahaan kurang kompetitif dan rentan isu hukum terkait korupsi atau suap. Istilah *corporate governance* muncul karena adanya teori keagenan, di mana kepemilikan suatu perusahaan terpisah dari kepengurusan. Adanya pemisahan ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Konflik kepentingan ini dapat diminimalisasi dengan adanya mekanisme *corporate governance*. Menurut Rachmawati & Triatmoko (2007), terdapat empat mekanisme *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Penelitian Putra (2015), Obradovich & Gill (2013), dan Abbasi, Kalantari, & Abbasi (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian Romano, Ferreti, & Rigolini (2012), Zakaria (2018), Herman (2016), dan Rachman (2018) menyatakan tidak berpengaruh.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor pertambangan merupakan sektor yang bergerak pada bidang pengelolaan sumber daya alam di mana dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi sangat membutuhkan izin dari pemerintah. Berdasarkan fenomena yang ada, perusahaan pertambangan turut berperan sebagai penunjang pendanaan dalam aktivitas politik di Indonesia di mana hal ini berkaitan dengan adanya koneksi politik.

Hubungan antara koneksi politik, *corporate governance* dan kinerja keuangan telah diteliti sebelumnya, namun menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Berdasarkan fenomena dengan kajian teori yang ada dan diperkuat dengan kajian empiris, peneliti ingin melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Resource Dependence Theory (Teori Ketergantungan Sumber Daya)

Emerson (1962) menyatakan bahwa teori ketergantungan sumber daya menggambarkan bagaimana sumber daya eksternal organisasi mempengaruhi perilaku organisasi. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang penting untuk membantu perusahaan mendapatkan berbagai manfaat, seperti kemudahan izin dan akses ke pemerintah

yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehingga terjadi peningkatan kinerja perusahaan.

Agency Theory (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan yang terjadi antara *prinsipal* dan *agent* dijelaskan oleh teori keagenan, di mana *agent* bertindak sebagai pembuat keputusan untuk mewakili *prinsipal* (Jensen & Meckling, 1976). Konsep *corporate governance* bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan mekanisme *corporate governance* merupakan perwujudan dari *agency cost* yang berfungsi mengatasi konflik keagenan sehingga kinerja yang dihasilkan manajer optimal.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Perusahaan yang membangun koneksi dengan pemerintah memperoleh beberapa dampak baik positif maupun negatif. Berdasarkan teori ketergantungan sumber daya, koneksi politik merupakan sumber daya eksternal yang penting untuk membantu perusahaan mendapatkan berbagai manfaat, seperti seperti kemudahan izin dan akses ke pemerintah yang akan membuat perusahaan fokus untuk memperoleh *profit*.

H₁: Koneksi Politik Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Semakin banyak pemonitor atau pengawas dalam suatu perusahaan artinya semakin baik, karena hal ini dapat menekan konflik sehingga *agency cost* akan menurun (Jensen & Meckling, 1976). Kehadiran dewan komisaris independen yang bersifat obyektif berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif dan mematuhi ketentuan, sehingga direksi dapat mengoptimalkan kinerja (Putra, 2015).

H₂: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengawasan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan tidak hanya terbatas pada pengawasan oleh dewan komisaris, tetapi juga terdapat peran dari komite audit untuk melaksanakan pengawasan. Peran komite audit adalah membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen untuk peningkatan kualitas kinerja perusahaan dan pengurangan penyimpangan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan (Zakaria, 2018).

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Aktivitas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan akan lebih ketat dengan adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan ini dapat mendorong transparansi oleh pihak manajemen dan peningkatan kinerja pada perusahaan. Beberapa peneliti meyakini bahwa struktur kepemilikan ini mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan (Rachmawati & Triatmoko, 2007)

H₄: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Selain aktivitas pengawasan, keterlibatan manajer melalui kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik (Martsila & Meiranto, 2013). Dengan

adanya keterlibatan ini tanggung jawab yang dimiliki oleh manajer cenderung lebih besar, melaksanakan pengambilan keputusan terbaik serta penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi yang tepat.

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan ringkasan laporan keuangan perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, dihasilkan jumlah sampel berikut.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan pertambangan yang listing di BEI	47
Tidak terdaftar secara berturut – turut di BEI dari tahun 2016 – 2018	(5)
Laporan keuangan tidak dipublikasikan secara lengkap dari tahun 2016 – 2018	(3)
Jumlah yang memenuhi syarat sebagai sampel	39

Sumber: Data diolah penulis

Koneksi Politik

Pengukuran koneksi politik mengacu pada penelitian Chaney, Faccio, & Parsley (2011) yaitu diukur menggunakan variabel *dummy* dengan beberapa kriteria tertentu. Perusahaan terkoneksi politik diberi angka 1, jika sebaliknya diberi angka 0. Perusahaan dikategorikan terkoneksi politik jika salah satu kriteria berikut terpenuhi.

1. Dewan komisaris, dewan direksi, atau sekretaris pada periode 2014 – 2019 menjabat sebagai anggota MPR/menteri/pejabat militer atau merupakan mantan pejabat pemerintah/militer.
2. Pemegang saham dengan kepemilikan minimal 10% pada periode 2014 – 2019 menjabat sebagai anggota MPR/menteri/pejabat militer atau merupakan mantan pejabat pemerintah/militer.

Corporate Governance

Corporate Governance diukur menggunakan empat unsur mekanisme *Corporate Governance*, yang masing-masing dihitung sebagai berikut.

- 1) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen ini merupakan proporsi komisaris independen yang ada dalam struktur organisasi perusahaan. Menurut Rachmawati & Triatmoko (2007), proporsi ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{jumlah Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

- 2) Komite Audit

Komite audit ini merupakan total jajaran komite audit dalam suatu perusahaan. menurut Siallagan & Machfoedz (2006), dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

- 3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan, dan institusi lainnya. Menurut Rachmawati & Triatmoko (2007), presentase ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusi}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

4) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial. Menurut Rachmawati & Triatmoko (2007), presentase ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan

Return On Assets (ROA) dipilih untuk memproksikan kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini. ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang efektif. Menurut Tandelilin (2010), ROA diukur menggunakan rumus berikut.

$$ROA = \frac{\text{Earnings Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan tahunan yang dimuat pada laman IDX atau situs *web* perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS. Analisis berupa pengujian asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F (simultan), dan uji t (parsial). Dalam penelitian ini dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- Y : *Return On Assets* (ROA)
- α : konstanta
- β_1 s/d β_5 : koefisien regresi variabel independen
- X_1 : Koneksi Politik
- X_2 : Dewan Komisaris Independen
- X_3 : Komite Audit
- X_4 : Kepemilikan Institusional
- X_5 : Kepemilikan Manajerial
- e : Kesalahan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

N	Asymp. Sig. (2-tailed)
117	0,016
110	0,060

Sumber: Data diolah penulis

Uji normalitas dilakukan sebanyak dua kali menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengujian pertama dengan jumlah sampel sebanyak 117 menghasilkan signifikansi 0,016 di mana nilai kurang dari 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Penyebabnya adalah adanya data outlier, sehingga data tersebut perlu dihilangkan. Setelah dihilangkan, didapat kesimpulan bahwa data telah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,060 pada pengujian kedua.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF pada variabel Koneksi Politik sebesar 1,070, Dewan Komisaris Independen sebesar 1,050, Komite Audit sebesar 1,138, Kepemilikan Institusional sebesar 1,463, dan Kepemilikan Manajerial sebesar 1,488. Nilai VIF ini kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin Watson menghasilkan nilai 2,081, sementara nilai dU pada tabel sebesar 1,7851. Artinya, nilai Durbin Watson lebih besar dari nilai dU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas. Hasil nilai signifikansi pada variabel Koneksi Politik sebesar 0,590, Dewan Komisaris Independen sebesar 0,052, Komite Audit sebesar 0,430, Kepemilikan Institusional sebesar 0,168, dan Kepemilikan Manajerial sebesar 0,895. Nilai yang dihasilkan lebih dari 0,05 artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,306 ^a	0,094	0,050

Sumber: Data diolah penulis

Adjusted R Square sebagai hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,050 atau 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh koneksi politik dan *corporate governance* sebesar 5%, sementara 95% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji F (Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F

	Model	F	Sig.
1	Regression	2,146	,066 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Data diolah penulis

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 2,146 dan signifikansi 0,66 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga pengujian ini menolak H_1 , maka secara simultan Koneksi Politik dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Uji t (Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3,240	8,203			0,395	0,694
PC	0,959	1,829	0,051		0,524	0,601
DKI	-20,614	9,023	-0,219		-2,285	0,024
KA	0,928	2,017	0,046		0,460	0,646
KI	7,686	4,238	0,205		1,814	0,073
KM	6,566	7,449	0,100		0,882	0,380

Sumber: Data diolah penulis

Hasil uji t menghasilkan nilai t hitung dan signifikansi untuk setiap variabel independen. Nilai signifikansi variabel koneksi politik sebesar 0,601 di mana angka ini jauh di atas 0,05, sehingga hipotesis pertama ditolak, kesimpulannya koneksi politik tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Signifikansi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,024 dimana lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien -20,614, maka hipotesis kedua diterima artinya Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Kinerja. Sedangkan, variabel komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ketiga, keempat, dan kelima ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hasil pengujian menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis pertama ditolak. Hasilnya sesuai dengan penelitian Prihandono (2018). Hal ini tidak selaras dengan *Resource Dependence Theory* yang menunjukkan bahwa koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang dapat membantu peningkatan kinerja melalui berbagai manfaat yang diterima perusahaan. Kondisi ini dapat terjadi ketika menunjukkan orang-orang yang terkoneksi atau berlatar belakang politik untuk menempati posisi dewan komisaris, dewan direksi, maupun sekretaris tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Pengalaman dan kompetensi yang tidak memadai membuat efektivitas dari fungsi yang diharapkan oleh *stakeholder* tereduksi (Prihandono, 2018). Faktor lain yang dapat menyebabkan kondisi tersebut adalah risiko atau pengaruh lain di luar perusahaan, yaitu *trend* perubahan harga komoditas pertambangan dunia yang berimbas pada perolehan laba perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, meskipun terdapat sumber daya berupa koneksi politik

yang menunjang kegiatan operasi perusahaan, ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga komoditas yang cukup signifikan yang tidak dapat dikendalikan perusahaan membuat manfaat yang diperoleh dari adanya koneksi politik tidak berdampak pada kinerja keuangan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Nilai signifikansi yang dihasilkan menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis kedua diterima di mana hal ini selaras dengan penelitian Putra (2015). Sesuai dengan *Agency Theory*, keberadaan mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk mengatasi konflik keagenan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan secara independen dalam pengelolaan perusahaan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah negatif, artinya penambahan jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan terjadinya penurunan kinerja keuangan. Banyaknya jumlah dewan komisaris independen menyebabkan kesulitan saat menjalankan fungsi, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antar dewan komisaris (Putra, 2015) sehingga perannya kurang optimal. Semakin mendekati jumlah minimal, maka pengaruh yang diberikan akan bergerak ke arah positif.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Signifikansi uji t menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, maka hipotesis ketiga ditolak. Hasilnya menguatkan penelitian Zakaria (2018), di mana keberadaan atau jumlah komite audit sehubungan dengan pengawasan tidak menjamin efektivitas operasi. Kondisi ini tidak sesuai dengan *Agency Theory*, dimana keberadaan mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk mengatasi masalah keagenan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Pembentukan komite audit yang dilakukan dengan tujuan hanya sebagai pemenuhan kepatuhan pada peraturan menunjukkan kurang optimalnya peran komite audit. Keberadaan komite audit yang berfungsi membantu tugas dewan komisaris dan menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan tidak sepenuhnya tercapai. Penyebabnya adalah pengawasan yang dilakukan komite audit dalam proses penyajian informasi pelaporan keuangan hanya terbatas pada melakukan tinjauan terhadap informasi akuntansi dan keuangan perusahaan, tetapi tidak ada keterlibatan langsung komite audit dalam proses penyelesaian masalah keuangan yang terjadi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengujian yang dilakukan menghasilkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis keempat ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Herman (2016). Kondisi ini tidak selaras dengan *Agency Theory*, bahwa keberadaan mekanisme *corporate governance* berfungsi sebagai alat pengatasan masalah keagenan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Adanya asimetri informasi dimana informasi yang dimiliki pihak institusi tidak sebaik informasi yang dimiliki pihak manajemen menyebabkan kepemilikan institusional tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak lagi bergantung pada pengawasan yang dilakukan pihak institusi tetapi sudah dibawah kendali manajemen (Herman, 2016). Sehingga besarnya tingkat kepemilikan institusional tidak dapat menjamin efektivitas pengawasan kinerja. Tidak adanya pengaruh tersebut juga disebabkan karena perusahaan menghadapi risiko atau pengaruh lain di luar kendali perusahaan, yaitu *trend* harga komoditas pertambangan dunia yang mengalami perubahan cukup signifikan dimana hal ini akan berdampak pada perolehan laba perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Uji t menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis kelima ditolak, yang mana mendukung penelitian Rachman (2018). Hasil ini tidak sejalan dengan *Agency Theory*, bahwa keberadaan mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk mengatasi masalah keagenan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Penyebabnya adalah tingkat kepemilikan manajerial di Indonesia yang rendah. Dalam penelitian ini rata-rata proporsi kepemilikan manajerial hanya sebesar 5,67% sehingga peran kepemilikan manajerial untuk menyamakan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham belum bisa berjalan efektif. Rendahnya proporsi tersebut mengakibatkan belum ada rasa memiliki perusahaan oleh pihak manajemen karena keuntungan perusahaan tidak semua dapat dinikmati (Rachman, 2018), sehingga menyebabkan manajer kurang termotivasi untuk mengoptimalkan kinerja, akibatnya tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah koneksi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan kompetensi dewan komisaris, direksi, dan sekretaris yang terkoneksi politik kurang memadai, serta adanya faktor dari luar yaitu *trend* perubahan harga komoditas pertambangan dunia yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak terdapat pengaruh.

Corporate Governance yang diukur menggunakan mekanisme secara simultan juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan pada proporsi dewan komisaris independen akan berakibat pada penurunan kinerja. Banyaknya jumlah dewan komisaris independen menyebabkan kesulitan saat menjalankan fungsi, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antar dewan komisaris, sehingga perannya kurang optimal. Sedangkan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal ini disebabkan pengawasan yang dilakukan komite audit dalam proses penyajian informasi pelaporan keuangan hanya terbatas pada melakukan tinjauan terhadap informasi akuntansi dan keuangan perusahaan, tetapi tidak ada keterlibatan langsung komite audit dalam proses penyelesaian masalah keuangan yang terjadi. Begitu juga dengan kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh, disebabkan oleh kinerja keuangan tidak lagi bergantung pada pengawasan yang dilakukan pihak institusi tetapi sudah dibawah kendali manajemen sehingga besarnya tingkat kepemilikan institusional tidak dapat menjamin efektivitas pengawasan kinerja. Kepemilikan manajerial juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penyebabnya adalah rendahnya proporsi kepemilikan mengakibatkan belum ada rasa memiliki perusahaan oleh pihak manajemen karena keuntungan perusahaan tidak semua dapat dinikmati sehingga menyebabkan manajer kurang termotivasi untuk mengoptimalkan kinerja.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel penelitian dengan menambah sektor perusahaan. Penambahan variabel lain juga dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya karena berdasarkan *Adjusted R Square*, sebesar 95% kinerja perusahaan masih dipengaruhi oleh faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, M., Kalantari, E., & Abbasi, H. (2012). Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Value Evidence from the Food Industry of Iran. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(5), 4712–4721.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Dicko, S. (2016). The Impact of Political Connections on the Performance and Solvency of Canadian

- Financial Institutions. *International Journal of Economics and Finance*, 8(11), 1. <https://doi.org/10.5539/ijef.v8n11p1>
- Emerson, R. M. (1962). Power-Dependency ratio. *American Sociological Review*, 27(1), 31–41.
- Herman, N. W. (2016). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan. *Accounting Analysis Journal*, 5(3).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>
- Martsila, I. S., & Meiranto, W. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–14.
- Obradovich, J., & Gill, A. (2013). The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms. *Jordan Journal of Business Administration*, 12(4), 899–917. <https://doi.org/10.12816/0034973>
- Prihandono, A. P. (2018). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Terhadap Kinerja Perusahaan BUMN. *Journal of Accounting and Business*, 10(2), 1–15.
- Primadhyta, S. (2017, 15 September). OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal. Diperoleh pada 9 Maret 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Putra, B. P. D. (2015). Pengaruh Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 8(2), 70–85.
- Rachman, R. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 3(4), 219–226.
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Universitas Sebelas Maret*, 1–26.
- Raharja, T. W. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 1–12.
- Ratnasari, Y. (2016, 31 Agustus). KPK Catat Piutang Rp23 Triliun Berasal dari Suap Tambang. Diperoleh pada 15 Februari 2020 dari <https://suara.com>
- Romano, G., Ferreti, P., & Rigolini, A. (2012). Corporate Governance and Performance in Italian Banking Groups. *Journal of Management and Governance*, 17(1), 1–27. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00591.x>
- Siallagan, H., & Machfoedz, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, (61), 23–26.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3), 277–300.

<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>

Zakaria, A. (2018). The Influence of the Audit Committee and the Remuneration Committee on Company Performance. *KnE Social Sciences*, 3(8), 18. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2498>